

PENANGANAN STUNTING DI TEMANGGUNG

Bappeda Dampingi Desa Kedungumpul

TEMANGGUNG (KR) - Pj Bupati dan Pj Sekda Temanggung melakukan inovasi penanganan stunting di kabupaten setempat, dengan penugasan satu perangkat daerah mendampingi satu desa. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung mendampingi Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan.

Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung, Dwi Sukarnei mengatakan angka stunting Kabupaten Temanggung pada 2023 mencapai 25,1 persen atau nomor 6 di Jawa Tengah. "Bappeda mendapat tugas pendampingan pengentasan stunting di Desa Kedungumpul. Ditargetkan semua kasus stunting tertangani sebelum akhir tahun 2024, dan tidak ada timbul stunting baru," kata Dwi Sukarnei, Jumat (28/6).

Dia mengatakan pendampingan yang dilakukan Bappeda antara lain dengan pemberian ma-

kanan tambahan, berupa telur, daging dan makanan bergizi lainnya, selama 90 hari. Pemberian ini langsung anak yang menderita stunting. "Orang tua tidak boleh mengonsumsi bantuan ini, karena ini khusus bagi anak yang mengalami stunting agar sembuh. Kami bagikan sekitar 1530 telur," kata dia.

Menurutnya, di Kedungumpul terdapat 20 kasus stunting di awal 2024 dan kini telah turun, tersisa sekitar 6 anak. Meski begitu, bantuan tetap diberikan kepada mereka yang terdaftar, sebagai pencegahan agar tidak masuk stunting. "Dalam penanganan stunting, perlu kreasi dan melibatkan banyak pihak. Diharapkan, dengan masuknya Bappeda di Kedungumpul bisa segera mencapai target zero stunting," ungkapnya.

Kades Kedungumpul Hendro Wacono mengatakan penanganan stunting di Desa Kedungumpul yang dilakukan secara bersama-



Pemberian telur secara simbolis kepada anak stunting.

sama telah berhasil mengurangi jumlah penderita, dan optimis sebelum akhir tahun sudah zero stunting. "Sebenarnya orang tua telah serius dalam merawat anaknya agar sehat, namun banyak faktor mempengaruhi sehingga anak ada yang masuk kekurangan berat badan atau tinggi

badan, meski itu sedikit," jelasnya.

Hendro mengharapkan, dengan langkah-langkah percepatan dari Pemerintah, tidak ada lagi stunting di Kedungumpul dan juga di Temanggung. Dengan demikian, di masa mendatang tercipta generasi penerus yang terbaik. **(Osy)-f**

PERTANGGUNGJAWABAN APBD SUKOHARJO 2023

DPRD Soroti Inventaris Aset Daerah

SUKOHARJO (KR) - Fraksi-fraksi di DPRD Sukoharjo memberikan sorotan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 terkait aset daerah. Sorotan diberikan mengingat keberadaan aset sangat penting bagi daerah. Karena itu diperlukan data valid.

Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Sukoharjo, Wahyu Mulyani saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sukoharjo, Kamis (27/6) mengatakan, FPDIP berpendapat bahwa rincian realisasi Pendapatan Daerah dari 1 Januari

sampai dengan 31 Desember 2023 realisasinya 106,32 persen, meningkat 7,25 persen dibanding realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer pada tahun 2023 realisasinya melebihi target anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar 118,46 persen dan 102,92 persen. Sedangkan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, realisasinya tidak mencapai target anggaran, yakni 55 persen dari target anggaran yang ditetapkan.

FPDIP memandang perlu adanya pemeriksaan atas daftar inventaris barang daerah, khususnya menyangkut aset tetap tanah berikut

Kartu Inventaris Barang (KIB) serta proses sertifikasi tanah yang dilakukan selama ini. Hal ini dilakukan untuk pengamanan fisik atas bidang tanah milik atau dikuasai Pemkab Sukoharjo.

"Menyangkut aset tanah ini Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan. Langkah apakah yang dilakukan eksekutif dalam melakukan pengamanan fisik atas tanah milik atau dikuasai Pemkab, diminta agar dijelaskan. FPDIP juga mempertanyakan aset bidang tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang telah bersertipikat.

Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD

Sukoharjo, Tri Jaswanto mengatakan, fraksinya juga mencermati rekapitulasi aset tetap berupa tanah, terjadi pengurangan nilai Rp 730,8 juta. Fraksi Golkar juga minta penjelasan aset tanah yang sudah disertipikatkan dan yang belum disertipikatkan, jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sukoharjo, Sunoto mengatakan, di dalam neraca aset tetap berupa tanah ada anggaran sebesar Rp 3.450.664.317.539,00. Di situ, juga ada properti investasi tanah Rp 6.067.345.028,00. "Fraksi PAN mohon penjelasan," ungkapnya.

(Mam)-f

DPRD Klaten Minta PAD Ditingkatkan

KLATEN (KR) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Klaten memberikan beberapa catatan atas laporan pertanggungjawaban APBD 2023. Antara lain meminta agar eksekutif meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), karena saat ini masih sangat minim.

Wakil Ketua DPRD Klaten H Triyono usai rapat paripurna, Jumat (28/6) mengatakan, ada beberapa catatan strategis yang disampaikan kepada bupati, agar nantinya Kabupaten Klaten menjadi lebih baik.

"Ada beberapa catatan yang perlu disampaikan kepada bupati berkaitan dengan nota-nota keuangan yang kira-kira indikatornya tidak tercapai. Tetap kita push untuk bisa

tercapai paling tidak 90 persen," kata H Triyono.

Terkait PAD, dewan mendorong bupati untuk berupaya lebih meningkatkan lagi, karena masih jauh dari harapan. Dari APBD sekitar tiga triliun rupiah, PAD hanya sekitar Rp 349 juta. "Minim sekali pendapatan asli daerah, maka kita harus berusaha meningkatkan di tahun depan. Idealnya ya diatas Rp 700 juta," tandas Triyono.

Pada rapat paripurna tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Klaten menyetujui sebanyak empat Raperda ditetapkan menjadi Perda. Masing-masing adalah Perda tentang laporan pertanggungjawaban APBD Klaten tahun 2023. Perda tentang hak keuangan dan administratif

pimpinan dan anggota DPRD Klaten. Perda tentang pemajuan kesenian daerah, dan Perda tentang pemotongan hewan dan penanganan daging serta hasil ikutan.

Pada awalnya, rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan dihadiri Bupati Klaten Sri Mulyani. Selanjutnya pimpinan rapat diserahkan kepada wakil ketua DPRD, H Triyono, dikarenakan Hamenang ada keperluan penting yang harus segera diselesaikan. Bupati Klaten Sri Mulyani juga pamit sehingga minta kepada Asisten Administrasi Umum Setda Klaten, Himawan Purnomo, untuk mengikuti rapat paripurna hingga selesai.

Dalam pendapat akhir



Triyono menandatangani persetujuan Perda.

atas penetapan empat Perda tersebut, Bupati antara lain mengemukakan, minta kepada semua organisasi perangkat daerah khususnya inspektorat untuk segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK dengan segera menyusun action plan, agar kesalahan

yang sama tidak terulang kembali. Selain itu Bupati juga mengatakan jika untuk pemajuan kesenian daerah diperlukan lembaga sebagai media atau ruang untuk berkreasi dan berkarya agar kesenian daerah berkembang lebih baik dan lestari. **(Sit)-f**

CALON TUNGGAL TERPILIH AKLAMASI

Rinto Pimpin Askab PSSI Karanganyar

KARANGANYAR (KR) - Kongres Pemilihan Ketua Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Karanganyar menetapkan Rinto Subekti sebagai Ketua Umum Askab Karanganyar periode 2024-2029. Ia merupakan calon tunggal yang dipilih secara aklamasi oleh pemilik suara kongres, Rabu (26/6) di rumah dinas bupati setempat.

Ketua Panitia Kongres Askab PSSI Karanganyar, Aris Santoso mengatakan, terpilihnya Rinto Subekti sebagai Ketua Askab Karanganyar itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Rinto Subekti menjadi calon tunggal Ketua Askab PSSI Karanganyar. "Secara umum, kongres berlangsung lancar sesuai dengan yang tercantum dalam statuta PSSI," jelasnya.

Perwakilan Asprov PSSI Jawa Tengah, Ismu Purwito minta Ketua Askab Karanganyar yang baru terpilih untuk bergandengan tangan dalam membangun sepakbola Karanganyar. Dengan demikian ke depan perkembangan sepakbola Karanganyar akan lebih baik lagi.

Ismu menilai proses pemilihan hingga penetapan Ketua Askab



Ketua Askab PSSI Karanganyar 2024-2029 Rinto Subekti (tengah).

PSSI Karanganyar sudah sesuai prosedur. "Saya mendapat tugas dari Ketua Asprov Jawa Tengah untuk hadir dalam kongres Askab PSSI Karanganyar. Kami minta seluruh PS harus kembali gubruk untuk membangun sepakbola Karanganyar," ungkapnya.

Ketua Umum Askab Karanganyar terpilih, Rinto Subekti menyatakan siap mengemban amanah setelah terpilih menjadi Ketua Askab Karanganyar. "Tentu ini menjadi PR, tapi saya akan berusaha dan berharap se-

masuk kearifan lokal yang ada di Kabupaten Karanganyar. Rinto berharap semua harus bergandengan tangan dalam rangka memajukan sepak bola dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada.

Poin kedua, Rinto mengatakan berkaitan dengan perbaikan sarana prasarana pendukung sepakbola Karanganyar. Rinto akan berjuang untuk perbaikan stadion yang ada. Namun tentunya dengan kolaborasi bersama Pemkab Karanganyar. Poin ketiga, Rinto mengatakan akan melakukan pembinaan, lisensi dan regenerasi wasit maupun pengawas pertandingan.

Rinto menambahkan bahwa Sekolah Sepak Bola (SSB) juga akan menjadi perhatian utama dalam hal pembinaan pemain usia dini. Dikatakannya, Karanganyar memiliki banyak pemain potensial. "SSB ini jadi perhatian utama. Kita jadikan SSB ini sebagai ajang untuk mencetak pemain handal di masa yang datang," katanya. Terkait dengan prestasi, Rinto menargetkan secara khusus mampu membawa Persika Karanganyar ke Divisi II. **(Lim)-f**



KR-Wahyu Imam Ibad

Bupati Sukoharjo Etik Suryani saat penyaluran bantuan beras CPP.

PENYALURAN CPP JUNI 2024 Tahap II Telah Selesai

SUKOHARJO (KR) - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) alokasi bulan Juni 2024 resmi disalurkan. Secara keseluruhan proses penyaluran bantuan beras kepada warga kurang mampu untuk tahap 1 alokasi bulan Januari, Februari dan Maret dan tahap 2 bulan April, Mei dan Juni telah selesai.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, penyaluran bantuan beras kepada warga kurang mampu dalam program CPP alokasi Juni 2024 sudah dilakukan.

Diharapkan dalam waktu sekitar satu pekan, seluruh proses bisa diselesaikan. Artinya bantuan beras diterima warga penerima sesuai data yang ada.

Bantuan beras tersebut diberikan kepada warga kurang mampu masing-masing 10 kilogram. Beras diberikan secara utuh dalam bentuk barang diserahkan oleh petugas dan diterima langsung oleh warga penerima sesuai data.

Proses penyaluran bantuan beras dipantau langsung oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani bersama jajaran pejabat Pemkab Sukoharjo dengan turun ke lokasi.

Warga penerima bantuan CPP dilarang menjual beras yang diterima tetapi wajib dikonsumsi bersama keluarga terdata sebagai penerima bantuan. Bupati menegaskan, larangan menjual beras CPP sudah menjadi kebijakan pemerintah. Sebab pemerintah sengaja memberikan bantuan beras CPP kepada warga sebagai bentuk meringankan beban memenuhi kebutuhan pangan keluarga. **(Mam)-f**



KR-Zaini Arrosyid

REKAM DATA: Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Magelang melakukan perekaman data kependudukan, KTP-E bagi warga di Kecamatan Bandongan, utamanya pemilih pemula, Rabu (26/7). Ribuan warga di kabupaten tersebut belum menjalani perekaman data kependudukan. Perekaman diperlukan untuk mendapatkan KTP-Elektronik yang mempunyai banyak manfaat yang di antaranya untuk mendapatkan layanan dari pemerintah, serta pencemblosan dalam pemilu.

HARI BHAYANGKARA KE-78 Sukoharjo Gelar Donor Darah

SUKOHARJO (KR) - Polres Sukoharjo menggelar bakti sosial donor darah di Mako Polres Sukoharjo, Rabu (26/6). Bakti sosial dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-78 yang jatuh pada 1 Juli 2024.

Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit melalui Kasubsi Penmas Polres Sukoharjo Briпка Eka Prasetya dalam keterangannya mengatakan, peserta donor darah merupakan anggota Polres Sukoharjo, Polsek jajaran, serta anggota TNI dan masyarakat.

Menurutnya, donor darah dilakukan untuk membantu ketersediaan stok darah Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kabupaten Sukoharjo.

"Semoga dengan kegiatan ini dapat membantu ketersediaan stok darah, sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan," ungkap Briпка Eka. Dalam pelaksanaan donor darah tersebut, sebanyak 118 kantong darah berhasil disumbangkan. **(Mam)-f**



KR-Dok Polres Sukoharjo

Bakti sosial donor darah di Mapolres Sukoharjo.